



Peningkatan Pemahaman *Soft Power Diplomacy* dan Proyeksi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Mahasiswa Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura

Hardi Alunaza^{1*}, Arif Wicaksa², Thomas Ardian Siregar³

¹ Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura, Indonesia

² Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Riau, Indonesia

³ Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Indonesia

Corresponding Author: hardi.asd@fisip.untan.ac.id

Received 11-03-2025

Revised 19-03-2025

Published 24-03-2025

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini didasari bahwa kebijakan luar negeri Indonesia merupakan hal yang kompleks dan mahasiswa perlu mendapatkan edukasi mengenai proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia dalam perubahan politik dunia. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Tanjungpura pada Bulan Februari 2025 secara daring melalui *zoom metting conference* dengan tujuan peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan bentuk pelaksanaan kegiatan terdiri dari penyampaian materi, diskusi tanya jawab, serta dokumentasi dan pelaporan akhir kegiatan. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai *soft power* dan diplomasi publik Indonesia. Kegiatan ini juga memberikan dampak bagi pemahaman mahasiswa mengenai proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap proteksionisme AS, respons terhadap kebijakan perdagangan Uni Eropa, posisi Indonesia dalam isu Israel-Palestina, Rusia – Ukraina, ASEAN dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dan isu terkait Indonesia dan BRICS.

Kata Kunci: *Diplomasi; Kebijakan Luar Negeri; Perubahan Politik Dunia.*

ABSTRACT

This community service activity is based on the fact that Indonesia's foreign policy is complex and students need to be educated about Indonesia's foreign policy projections in changing world politics. This community service activity was carried out at Tanjungpura University in February 2025 online through a zoom metting conference with the aim of increasing student understanding of Indonesia's foreign policy projections. This community service activity was carried out with a form of activity implementation consisting of material delivery, question and answer discussions, as well as documentation and final reporting of activities. The results of this activity show an increase in student understanding of soft power and Indonesian public diplomacy. This activity also has an impact on students' understanding of Indonesia's foreign policy projections towards US protectionism, responses to EU trade policies, Indonesia's position on the Israel-Palestine issue, Russia - Ukraine, ASEAN in Indonesia's foreign policy, and issues related to Indonesia and BRICS.

Keywords: *Diplomacy; Foreign Policy; Changing World Politics.*

PENDAHULUAN

Ketidakpastian global saat ini semakin meningkat akibat sejumlah faktor yang saling terkait, menciptakan tantangan kompleks bagi negara-negara di seluruh dunia (Jumadi, 2017). Rivalitas geopolitik dan ekonomi antara kekuatan besar semakin



tajam, dengan persaingan untuk dominasi wilayah dan sumber daya yang dapat mempengaruhi kestabilan politik dan ekonomi global serta adanya polarisasi global (Armawi & Wijatmoko, 2022). Adanya krisis keuangan, disrupsi rantai pasok, dan kebijakan proteksionisme menjadi permasalahan baru dalam konstelasi politik global saat ini (Anam, 2008). Di sisi lain, disrupsi teknologi digital yang pesat telah mengubah cara berbisnis, bekerja, dan berinteraksi, sekaligus menciptakan peluang dan tantangan baru dalam dunia yang semakin terhubung (Erick Saragih et al., 2023). Selain itu, isu lingkungan dan perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata yang tidak hanya memengaruhi kesejahteraan manusia, tetapi juga memperburuk ketegangan antar negara dalam upaya mengatasi dampaknya (Wibisono, 2024). Keempat faktor ini berkontribusi pada ketidakpastian global, yang menuntut respons adaptif dan kolaboratif di tingkat internasional.

Ketidakpastian global yang semakin meningkat telah menciptakan tantangan besar dalam hubungan internasional, dengan berbagai dinamika baru yang memperumit interaksi antarnegara. Meningkatnya kompleksitas hubungan internasional, yang dipengaruhi oleh perubahan geopolitik, ekonomi, dan sosial, menuntut pendekatan diplomasi yang lebih fleksibel dan inovatif (Ramadhan, 2018). Diplomasi tradisional yang statis kini harus beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang terus berubah, termasuk konflik regional, krisis global, dan kemajuan teknologi yang memengaruhi pola interaksi antarnegara (Stanzel, 2018). Dalam menghadapi ketidakpastian ini, diplomasi harus mampu mengidentifikasi peluang kolaborasi, merespons dinamika dengan kecepatan dan ketepatan, serta mempromosikan solusi yang kreatif untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia yang lebih berkelanjutan (Martauli, 2018).

Selain permasalahan di atas, dunia saat ini juga tengah berada dalam kondisi yang disebut *polycrisis*, di mana berbagai krisis yang saling terkait (Hoeffler et al., 2024) dan memperburuk satu sama lain sedang berlangsung secara bersamaan (Lawrence et al., 2024). Krisis kemanusiaan seperti tragedi pengungsi Rohingya, memperlihatkan kegagalan sistem internasional dalam melindungi hak asasi manusia (Setiawan & Suryanti, 2021). Semua ini terjadi di tengah melemahnya solidaritas global, dengan multilateralisme yang kehilangan daya dan hukum internasional yang sering diabaikan (Kurniawan, 2009). Negara-negara besar, yang berusaha mempertahankan dominasinya dalam status quo, cenderung mengabaikan prinsip-prinsip kerja sama internasional demi kepentingan nasional. Ketegangan yang semakin meningkat ini, jika tidak dikelola dengan bijaksana, berpotensi membawa dunia pada ancaman yang jauh lebih besar, bahkan mungkin memicu perang nuklir yang menghancurkan.

Dalam menghadapi ketidakpastian politik internasional yang semakin kompleks, peran Indonesia dalam diplomasi regional dan global menjadi semakin penting (Ruyat, 2017). Sebagai negara dengan posisi strategis di Asia Tenggara dan anggota aktif dalam berbagai organisasi internasional, Indonesia memiliki tanggung

jawab untuk menjadi mediator dalam meredakan ketegangan geopolitik dan mempromosikan perdamaian (Husein & Sudiarto, 2024). Diplomasi Indonesia yang mengedepankan prinsip-prinsip bebas aktif, menghormati kedaulatan negara, serta menjaga stabilitas kawasan, berperan vital dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti konflik antarnegara, perubahan iklim, dan krisis kemanusiaan (Pratama, 2024). Dalam konteks ini, Indonesia bukan hanya berperan sebagai pemangku kepentingan regional, tetapi juga sebagai penghubung antara negara-negara besar dan kecil, serta berusaha menguatkan kerja sama multilateral untuk menciptakan solusi bersama yang berkelanjutan (Helmys & Irawan, 2023). Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam diplomasi global di tengah ketidakpastian yang ada.

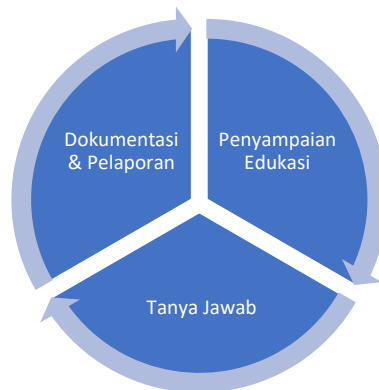
Ketidakpastian global yang terus berkembang memberikan baik peluang maupun tantangan bagi diplomasi Indonesia dalam memperkuat pengaruhnya di arena internasional. Di tengah rivalitas geopolitik yang semakin tajam dan pergeseran kekuatan global, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperbesar peran melalui pendekatan *soft power*, yaitu kekuatan yang berasal dari daya tarik budaya, nilai-nilai demokrasi, dan komitmen terhadap perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Melalui diplomasi budaya, bantuan kemanusiaan, serta kontribusi dalam penyelesaian konflik internasional, Indonesia dapat memperkuat citra positifnya di mata dunia. Namun, tantangan besar juga datang dari dinamika global yang cepat berubah, di mana Indonesia harus mampu beradaptasi dengan isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketegangan politik internasional. Untuk itu, Indonesia perlu merancang strategi diplomasi yang inovatif dan lebih terintegrasi, sehingga dapat memanfaatkan *soft power* untuk meningkatkan pengaruhnya di kancah global, sekaligus mempromosikan perdamaian dan stabilitas internasional.

Dengan mempertimbangkan dampak multidimensi yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian global, sangat penting bagi akademisi dan praktisi untuk bekerja sama dalam upaya memberikan edukasi kepada mahasiswa mengenai perkembangan *soft power diplomacy* dan proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia dalam perpolitikan dunia. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan para akademisi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai peningkatan peran Indonesia dalam *soft power diplomacy* dan kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, perlu diadakan edukasi khusus untuk peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai diplomasi dan proyeksi arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam konstelasi politik global.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menyasar mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional sebagai objek kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan tiga metode yakni penyampaian materi bekerja sama dengan praktisi dalam hal ini adalah diplomat senior dari Kementerian Luar Negeri

dan akademisi Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Riau, diskusi dan tanya jawab, serta diakhiri dengan dokumentasi dan pelaporan kegiatan (Alunaza, 2024). Kegiatan ini dilaksanakan diikuti oleh 298 peserta yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 di Bulan Februari selama dua hari secara online melalui zoom meeting conference dengan rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

- Kegiatan penyampaian materi edukasi terdiri dari dua bagian. Pertama adalah edukasi mengenai *the role of soft power diplomacy* yang disampaikan oleh praktisi dari Kementerian Luar Negeri dan yang kedua adalah proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia yang disampaikan oleh akademisi Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Riau.
- Untuk sesi tanya jawab dan diskusi ini terdiri dua bagian. Bagian pertama untuk materi mengenai *the role of soft power diplomacy* untuk tiga orang penanya, serta untuk materi arah kebijakan luar negeri Indonesia dengan tiga pertanyaan yang sama.
- Kegiatan edukasi ini ditutup dengan dokumentasi Bersama narasumber kegiatan pengabdian dan penulisan laporan kegiatan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Tanjungpura secara daring melalui *zoom meeting conference*. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional mengenai peran *soft power diplomacy* dan proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia dalam ketidakpastian dunia yang terus berubah. Edukasi pertama adalah mengenai *soft power diplomacy* Indonesia yang dibagi ke dalam beberapa poin paparan yakni peran *soft power*, strategi diplomasi publik, pilar dan aset diplomasi publik. Sementara edukasi paparan kedua mengenai proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia dibagi dalam beberapa poin yakni penjelasan mengenai Indonesia menjauh dari Barat, respons terhadap proteksionisme AS, respons terhadap kebijakan perdagangan Uni Eropa, posisi Indonesia dalam isu Israel-Palestina, Rusia – Ukraina, ASEAN dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dan isu terkait Indonesia dan BRICS.

Pendekatan *soft power* adalah dengan membangun pengaruh tanpa paksaan yang semakin relevan dalam diplomasi Indonesia, yang mengutamakan daya tarik daripada kekuatan militer atau ekonomi. Salah satu cara untuk memperkuat hubungan internasional adalah melalui budaya, pendidikan, dan kerja sama. Indonesia, dengan keberagaman budaya yang kaya, dapat memanfaatkan kekuatan budaya untuk mempererat hubungan dengan negara lain, menjalin pemahaman yang lebih dalam, serta membangun citra positif di dunia internasional. Selain itu, kerja sama di bidang pendidikan, seperti beasiswa dan pertukaran pelajar, membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkenalkan nilai-nilai nasionalnya di panggung global. Dengan mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, toleransi, dan perdamaian, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, sambil mempengaruhi dunia tanpa menggunakan paksaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan hubungan antarnegara, tetapi juga menciptakan saling pengertian dan rasa hormat di antara berbagai bangsa.

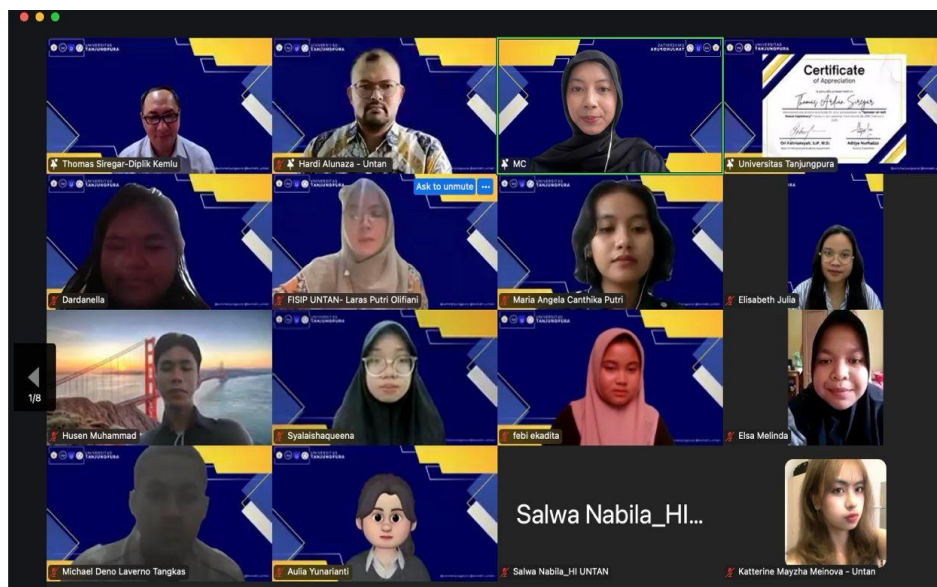


Gambar 2. Paparan Materi *Soft Power Diplomacy*

Diplomat senior dari Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri menekankan perlu adanya *national branding 2+1*, yakni dengan mendukung realisasi prioritas pemerintah Indonesia dalam memperkuat posisi negara di kancah internasional. Pendekatan ini menggabungkan elemen-elemen kunci, yaitu "2" yang mewakili kekuatan budaya dan ekonomi Indonesia, serta "1" yang mencerminkan nilai-nilai dasar seperti demokrasi dan keberagaman. Dengan memanfaatkan budaya Indonesia yang kaya serta potensi ekonomi yang terus berkembang, *national branding 2+1* dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Melalui promosi produk lokal, pariwisata, serta inovasi di bidang teknologi, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi dan memperluas pengaruhnya. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat hubungan internasional. Dengan memfokuskan pada kekuatan budaya dan ekonomi

yang dipadu dengan nilai-nilai inklusif, Indonesia dapat lebih mudah menarik perhatian global dan mempercepat tercapainya prioritas pembangunan nasional. +1 dalam pembangunan nasional ini didukung oleh adanya peran diaspora Indonesia. Hal ini merupakan strategi diplomasi publik yang dirancang oleh Indonesia dalam memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

Adapun pilar dan aset diplomasi publik Indonesia terbagi ke dalam beberapa kategori. Dalam bidang politik dan nilai kebangsaan dapat terlihat dari program seperti *Bali Democracy Forum*, *Bali Society and Media Forum*, *Dialogue on Democracy and Inclusive Society*, *Indonesian Aid*, dan *Santri Diplomacy*. Dalam bidang ekonomi dan pariwisata, Indonesia memiliki program *Indonesia Gastrodiplomacy Series*, *Update from the Region*, dan *Diplomatic Tour*. Sementara dalam bidang social budaya, Indonesia memiliki *Harmony for the Pacific*, Beasiswa Seni Budaya Indonesia, Internasionalisasi Bahasa Indonesia, Pemuda Berprestasi untuk Dunia, Kompetisi Desain Batik, dan Dialog Film. Kegiatan yang telah dilakukan selama ini yang berhubungan dengan dunia pendidikan adalah *diplomacy goes to school*, dan *diplomacy goes to campus*. Kementerian Luar Negeri juga menginisiasi Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Kegiatan lain seperti *Harmony for the Pacific* adalah sebuah inisiatif diplomasi publik yang menggunakan jalur sosial budaya untuk mendukung visi Pacific Elevation serta pelaksanaan diplomasi berdaulat yang berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat dan mempererat hubungan persahabatan serta kemitraan dengan negara-negara mitra di kawasan Pasifik melalui pendekatan kontak langsung antar masyarakat.



Gambar 3. Peserta Mendengarkan Paparan Praktisi dari Kemlu

Sementara pada paparan materi edukasi kedua, akademisi Universitas Riau menjelaskan mengenai Indonesia tampak skeptis terhadap sistem internasional dan tatanan global yang ada, sebuah sikap yang menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia kini lebih berorientasi pada *state power*. Ketidakpuasan terhadap dominasi

kekuatan Barat dalam berbagai isu global mendorong Indonesia untuk mencari alternatif yang lebih sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Dalam konteks ini, Indonesia mulai menjauh dari negara-negara Barat dan lebih mengutamakan hubungan dengan kekuatan alternatif non-Barat. Salah satu contoh nyata dari perubahan ini adalah keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS, sebuah kelompok negara berkembang yang berfokus pada kerja sama ekonomi dan politik. Keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan luar negeri awal yang dilakukan Indonesia pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memperluas jangkauan diplomatiknya dan memperkuat posisi dalam tatanan global yang lebih inklusif.

Salah satu target ekonomi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah mendapatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2025. Target pertumbuhan ekonomi ini meningkat dari target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang sebesar 5 persen. Untuk mencapai target ambisius ini, kebijakan luar negeri Indonesia memainkan peran penting sebagai instrumen ekonomi, terutama dalam upaya mencari pasar baru dan menarik investor potensial. Kebijakan Indonesia bergabung dengan BRICS merupakan salah satu respon dari kebijakan-kebijakan ekonomi negara Barat. Misalnya kebijakan *Inflation Reduction Act* oleh Amerika Serikat yang diterapkan sejak 2022, telah menghambat perdagangan mineral Indonesia yang kemudian dianggap merugikan perdagangan Indonesia. Di sisi lain, *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* yang juga digagas Amerika Serikat tidak menawarkan insentif tarif yang menguntungkan bagi negara-negara seperti Indonesia. Dengan kemungkinan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, proteksionisme AS diperkirakan akan meningkat, yang bisa berdampak pada tarif impor yang lebih tinggi dan menurunnya perhatian AS terhadap ASEAN. Tantangan ini menuntut Indonesia untuk menyesuaikan strategi diplomasi ekonomi guna menjaga pertumbuhannya di tengah dinamika global yang terus berubah.

Selain kebijakan bernuansa proteksionisme oleh Amerika Serikat, kebijakan dari Uni Eropa juga memberikan batasan ruang gerak pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Lebih spesifik, yakni kebijakan *EU Deforestation Regulation* dan *Carbon Border Adjustment Mechanism*. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ini memberikan hambatan bagi ekspor Indonesia, khususnya di sektor kelapa sawit dan industri berbasis karbon. Regulasi-regulasi ini mempersulit akses pasar karena mewajibkan produk yang diekspor untuk memenuhi standar keberlanjutan, perlindungan pekerja, dan hak asasi manusia. Bagi Indonesia, kebijakan tersebut bisa diinterpretasikan sebagai bentuk koersi ekonomi, yang memaksa negara untuk menyesuaikan praktik industri dengan regulasi yang seringkali dianggap memberatkan dan tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks lokal. Oleh karena itu, Indonesia perlu merespon dengan kebijakan yang tidak hanya memenuhi tuntutan pasar global, tetapi juga menjaga keberlanjutan sektor-sektor strategisnya.

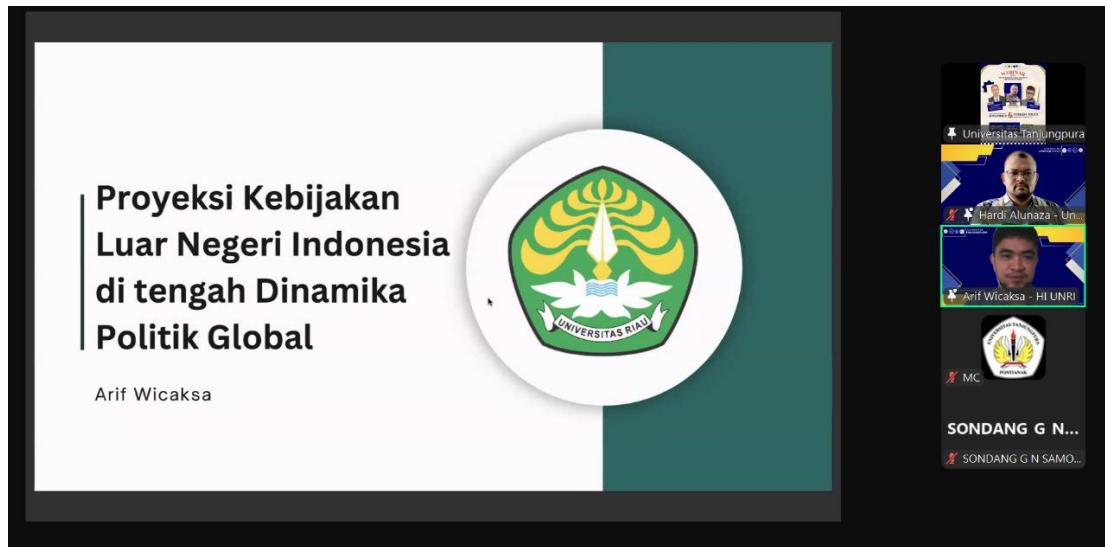
Indonesia mengambil sikap tegas dalam isu Palestina-Israel dan Rusia-Ukraina, dengan memperlihatkan konsistensi dalam mendukung prinsip-prinsip keadilan internasional. Dalam kasus Palestina, Indonesia menyoroti adanya standar ganda yang diterapkan oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, terkait permasalahan ini. Indonesia secara konsisten mendukung Palestina dan menuntut pertanggungjawaban Israel atas agresinya di Gaza, sikap ini tercermin dalam berbagai forum internasional, termasuk di PBB dan OKI. Namun, posisi Indonesia ini dipertanyakan dengan adanya *two state solution*. Seharusnya Indonesia menjunjung tinggi pendekatan *one state solution* dalam konflik Israel dan Palestina. Sebaliknya, dalam konflik Rusia-Ukraina, Indonesia memilih untuk tetap netral dan menekankan pentingnya penyelesaian damai tanpa keberpihakan. Indonesia berfokus pada dialog konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat, serta mendukung upaya-upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik tersebut dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

ASEAN tetap menjadi pilar utama kebijakan luar negeri Indonesia, terutama di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat. Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dengan kontribusi lebih dari 35% terhadap total PDB kawasan, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas dan sentralitas ASEAN. Dalam menghadapi rivalitas antara Amerika Serikat dan China, ASEAN dapat berfungsi sebagai buffer, menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Di sisi lain, melalui mekanisme seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, Indonesia berperan aktif dalam mengarahkan ASEAN untuk memastikan bahwa pengaruh China di kawasan tidak berkembang secara asimetris yang dapat merugikan stabilitas regional. Dengan memanfaatkan peran sentral ASEAN, Indonesia berusaha memastikan bahwa kawasan ini tetap damai, stabil, dan terbuka untuk kerja sama yang saling menguntungkan.

Secara umum bisa dikatakan bahwa banyak sikap dan kebijakan strategis Indonesia tidak sejalan dengan sikap dan kebijakan yang diambil oleh negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Keadaan ini pada akhirnya mendorong Indonesia untuk mencari peluang-peluang baru khususnya untuk menopang target-target perekonomian oleh Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, BRICS diharapkan menjadi wahana dalam mencapai target tersebut.

Bagi Indonesia, keanggotaan dalam BRICS membuka peluang besar untuk diversifikasi perdagangan, terutama dalam komoditas seperti sawit, batubara, gas alam, dan karet. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang selama ini menjadi mitra utama Indonesia. Dengan total nilai perdagangan yang diperkirakan mencapai 150 miliar USD pada 2024, BRICS menawarkan pasar baru yang lebih beragam dan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Selain itu, Indonesia juga mempertimbangkan impor minyak dari Rusia sebagai bagian dari kebijakan ketahanan energi nasional, untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau. Keanggotaan dalam BRICS

juga memperkuat wacana kerja sama Selatan-Selatan, yang mendorong negara-negara berkembang untuk lebih saling mendukung dalam bidang ekonomi dan pembangunan, mengurangi ketergantungan pada kekuatan ekonomi global dominan, dan menciptakan hubungan yang lebih adil serta saling menguntungkan.



Gambar 4. Paparan Materi Mengenai Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Di akhir pemaparan, peserta bertanya kepada pemateri dari Kementerian Luar Negeri mengenai proses pelembagaan diaspora yang ada di luar negeri. Hal ini diwujudkan dengan adanya strategi awal yakni dengan mendata dan memberikan kartu identitas khusus diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Peserta juga mempertanyakan bagaimana Indonesia dengan banyaknya channel seperti ASEAN, APEC, RCEP, IORA kepada pemateri kedua. Hal tersebut ditanggapi bahwa dengan banyaknya channel seharusnya Indonesia mendapatkan banyak kepentingan nasionalnya. Indonesia juga perlu menetapkan kluster kepentingan nasional dalam setiap channel yang diikuti agar menjadi langkah strategis dalam meningkatkan citra dan pencapaian kepentingan negara. Kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan bahwa ternyata mahasiswa masih harus terus mempelajari bentuk-bentuk diplomasi publik yang sudah dilakukan Indonesia ke negara lain guna memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Aditya Nurhaliza sebagai salah satu peserta mengakui bahwa proyeksi dari kebijakan luar negeri Indonesia mengalami kompleksitas yang sangat bersinggungan dengan berbagai kepentingan negara besar dan bagaimana Indonesia menjaga citra baik di dunia internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia mengoptimalkan pendekatan *soft power* dan *national branding 2+1* untuk memperkuat pengaruhnya di kancah internasional tanpa menggunakan paksaan. Melalui pemanfaatan kekuatan budaya, pendidikan, dan kerja sama internasional, Indonesia membangun citra positif serta mempererat hubungan dengan berbagai negara. Pendekatan ini juga mendukung prioritas pembangunan nasional dengan menggabungkan kekuatan budaya, ekonomi, dan nilai-nilai inklusif. Diplomasi publik Indonesia yang berfokus pada program-program strategis, seperti Bali

Democracy Forum dan Harmony for the Pacific, memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menunjukkan sikap yang tegas dan adaptif dalam merespons dinamika global, dengan fokus pada penguatan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada kepentingan nasional dan peningkatan posisi global. Indonesia mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional melalui diversifikasi perdagangan, terutama dengan bergabung dalam BRICS untuk menjalin hubungan dengan negara-negara berkembang dan memperkuat kerja sama Selatan-Selatan. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia tetap menjaga stabilitas regional melalui ASEAN, berusaha mengatasi tantangan dari kebijakan proteksionisme AS dan regulasi Uni Eropa. Indonesia juga konsisten mendukung Palestina dan mempertahankan netralitas dalam konflik Rusia-Ukraina, sambil memanfaatkan diplomasi ekonomi dan budaya untuk memperkuat hubungan internasional. Kegiatan ini memberikan peningkatan pengetahuan mengenai *soft power diplomacy* dan proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia bagi mahasiswa. Sebagai saran keberlanjutan kegiatan, mahasiswa perlu diedukasi mengenai *soft power diplomacy* dan proyeksi kebijakan luar negeri di kawasan tertentu seperti Afrika, Timur Tengah, dan juga Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alunaza, H. (2024). Pelatihan Penulisan Position Paper Model United Nation Bagi Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura. *Journal of Community Development*, 4(3), 353–361.
- Anam, S. (2008). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 217–236.
- Armawi, A., & Wijatmoko, E. (2022). Asia Pasifik Memanas, Ancamankah bagi ASEAN dan Indonesia? *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 365–389. <https://doi.org/10.24198/INTERMESTIC.V7N1.17>
- Erick Saragih, dkk. (2023). Era Disrupsi Digital pada Perkembangan Teknologi di Indonesia. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 2(4), 141–149. <https://doi.org/10.56444/transformati.v2i4.1152>
- Helmys, N., & Irawan, Y. (2023). Identitas Indonesia sebagai Negara Donor pada Kerja Sama Selatan-Selatan selama Presidensi G20. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(2), 31–54. <https://jurnal.kemlu.go.id/jurnal-hublu/article/view/15>
- Hoeffler, C., Hofmann, S. C., & Mérand, F. (2024). The Polycrisis and EU Security and Defence Competences. *Journal of European Public Policy*, 31(10), 3224–3248. <https://doi.org/10.1080/13501763.2024.2362762>
- Husein, M., & Sudiarto, T. D. (2024). Diplomasi Luar Negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif dalam Perang Rusia - Ukraina Selama Masa Presidensi G20 di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1237–1245.
- Jumadi. (2017). Perkembangan Ekonomi Politik Global Terhadap Kebijakan Politik dan Ekonomi Indonesia. *Proyeksi*, 22(1), 57–71. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1591>
- Kurniawan, N. I. (2009). Globalisasi & Negara Kesejahteraan: Perspektif Institusionalisme. Yogyakarta: *Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada*.

- Lawrence, M., Homer-Dixon, T., Janzwood, S., Rockstöm, J., Renn, O., & Donges, J. F. (2024). *Global Sustainability Global Polycrisis: the Causal Mechanisms of Crisis Entanglement*. <https://doi.org/10.1017/sus.2024.1>
- Martauli, S. (2018). Peran Diplomasi Sebagai Cara Meningkatkan Pengakuan Internasional terhadap Posisi Suatu Negara dalam Mengimplementasikan Kebijakan Politik Luar Negeri (Studi Kasus di Indonesia). *Jurnal Good Governance*, 13(1), 63–79. <https://doi.org/10.32834/gg.v13i1.30>
- Pratama, T. A. (2024). *Diplomasi Parlemen di Tengah Gejolak Dunia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Ramadhan, I. (2018). China's Belt Road Initiative: Dalam Pandangan Teori Geopolitik Klasik. *Intermestic: Journal of International Studies*. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.3>
- Setiawan, I. P., & Suryanti, M. S. D. (2021). Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019). *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 83–97. <https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.83-97>
- Stanzel, V. (2018). *New Realities in Foreign Affairs: Diplomacy in the 21st Century. Research Paper*.
- Wibisono, R. B. (2014). Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Perlindungan Lingkungan. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 17(2), 95–125.
- Yayat Ruyat. (2017). Peran Indonesia Dalam Mewujudkan Kerjasama Penanggulangan Terorisme Melalui ASEAN OUR EYES di Asia Tenggara. *Diplomacy and Global Security Studies*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2851>